

II . TINJAUAN PUSTAKA

A . Perilaku Pemilih

Keikutsertaan warga negara dalam pemilihan umum merupakan serangkaian kegiatan membuat keputusan, yakni apakah memilih atau tidak memilih dalam pemilihan umum. Perilaku memilih dapat ditunjukkan dalam memberikan suara dan menentukan siapa yang akan dipilih menjadi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada secara langsung. Perilaku memilih juga sarat dengan ideologi antara pemilih dengan partai politik atau kontestan pemilu. Masing-masing kontestan membawa ideologi yang saling berinteraksi. Selama periode kampanye, muncul kristalisasi dan pengelompokan antara ideologi yang dibawa kontestan. Masyarakat akan mengelompokkan dirinya kepada kontestan yang memiliki ideologi yang sama dan menjauhkan diri dari ideologi yang berseberangan dengan mereka.

Pemilih diartikan sebagai semua pihak yang menjadi tujuan utama para kontestan untuk mereka pengaruhi dan yakinkan agar mendukung dan kemudian memberikan suaranya kepada kontestan yang bersangkutan (Firmanzah,2007:102). Keputusan untuk memberikan dukungan dan suara tidak akan terjadi apabila tidak terdapat loyalitas pemilih yang cukup tinggi kepada calon pemimpin jagoannya. Begitu juga sebaliknya, pemilih tidak akan memberikan suaranya kalau mereka menganggap sebuah partai atau calon pemimpin tidak loyal serta tidak konsisten

dengan janji dan harapan yang telah mereka berikan. Perilaku memilih juga sarat dengan ideologi antara pemilih dengan partai politik atau kontestan pemilu. Masing-masing kontestan membawa ideologi yang saling berinteraksi. Selama periode kampanye, muncul kristalisasi dan pengelompokan antara ideologi yang dibawa kontestan. Masyarakat akan mengelompokkan dirinya kepada kontestan yang memiliki ideologi yang sama dan menjauhkan diri dari ideologi yang berseberangan dengan mereka. Menurut Kristiadi J(1996:76) Perilaku memilih merupakan keterkaitan seseorang untuk memberikan suara dalam suatu proses pemilihan umum berdasarkan Faktor pilihan rasional (*Rational choice*) faktor sosiologis, faktor psikologis, dan faktor rasional.

1 . Pendekatan Pilihan Rasional (*Rational Choice*)

Menurut Dieter Roth (2009:275) pendekatan ini dipopulerkan oleh Downs (1957) yang mengasumsikan bahwa pemilih pada dasarnya bertindak secara rasional ketika membuat pilihan dalam tempat pemungutan suara (TPS), tanpa mengira agama, jenis kelamin, kelas, latar belakang orang tua, dan latar lainnya yang bersifat eksternal. Menurut Anthony Downs (1957:365), dalam konteks pilihan rasional, ketika pemilih merasa tidak mendapatkan kaidah dengan memilih partai atau calon kandidat yang tengah berkompetisi, ia bahkan tidak akan melakukan pilihan pada pemilu. Mereka menggunakan pertimbangan-pertimbangan *costs and benefits* sebelum menentukan pilihan. Pertimbangan *costs and benefits* itu lebih didasarkan pada gagasan atau program-program yang bersentuhan dengan dirinya. Pendekatan ini kemudian dikembangkan oleh Morris P Fiorina (1981) dalam model keputusan pemilu restospektif.

Dalam model ini tampak bahwa teori perilaku pemilu yang rasional dan pendekatan sosial psikologis sejatinya dapat dikombinasikan dan dikomplementasikan satu sama lain.

2. Pendekatan Sosiologis (Mashab Columbia)

Pendekatan sosiologis dalam sebuah jurnal Poelitik (Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan) yang berjudul Partai Politik Dan Pesta Demokrasi 2009. Mengungkapkan bahwa, pendekatan sosiologis pada dasarnya menjelaskan bahwa karakteristik sosial dan pengelompokan-pengelompokan sosial mempunyai pengaruh yang cukup signifikan dalam menentukan perilaku pemilih. Pengelompokan sosial seperti umur (tua,muda), jenis kelamin, agama, dan sebagainya, dianggap mempunyai peranan yang cukup menentukan dalam membentuk perilaku pemilih

Sedangkan menurut Muhammad Asfar dalam Adman Nursal (2004:55), Pendekatan sosiologis menekankan pentingnya beberapa hal yang berkaitan dengan instrumen kemasyarakatan seseorang seperti, a) status sosial-ekonomi (pendidikan, jenis pekerjaan, pendapatan dan kelas), b) agama, c) etnik, serta d) wilayah tempat tinggal. Latar belakang pilihan atas partai atau calon, menurut model sosiologis dikembangkan dari asumsi bahwa perilaku pemilih ditentukan oleh karakteristik sosial pemilih.

3. Pendekatan Psikologis (*Mahzab Michigan*)

Pendekatan yang kedua adalah *pendekatan psikologis*. Pendekatan ini dikembangkan sebagai respons atas pendekatan sosiologis. Pendekatan psikologis dikembangkan di *University of Michigan* di Amerika Serikat, sehingga kemudian pendekatan perilaku memilih ini dikenal dengan sebutan *Mahzab Michigan (Michigan School)*. Pelopor pendekatan ini adalah August Campbell. (dalam Muhammad Asfar 2002:141).

Kemunculan pendekatan ini merupakan reaksi atas ketidakpuasan mereka terhadap pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis dianggap secara metodologis sulit diukur, seperti bagaimana mengukur secara tepat sejumlah indikator kelas sosial, tingkat pendidikan, agama, dan sebagainya. Apalagi pendekatan ini hanya sebatas menggambarkan dukungan suatu kelompok terhadap kandidat atau partai politik tertentu. Tidak sampai pada penjelasan mengapa suatu kelompok tertentu memilih/mendukung suatu partai tertentu sementara yang lain tidak.

Menurut pendekatan ini, salah satu kekuatan politik adalah produk dari sikap dan disposisi seorang pemilih. Pendekatan ini lebih mendasarkan faktor psikologis dalam diri seseorang. Faktor psikologis ini, menurut Riswanda Imawan(1993:12-13) dideteksi dengan dua konsep:

1. *Political involvement*, yakni perasaan penting atau tidak ingin terlibat dalam isu-isu politik yang bersifat umum.

2. *Party identification*, yakni preferensi (perasaan suka atau tidak suka seseorang terhadap satu partai politik atau kelompok elit tertentu).

Seperti namanya, pendekatan ini menggunakan dan mengembangkan konsep psikologi terutama konsep sosialisasi dan sikap untuk menjelaskan perilaku memilih. Menurut pendekatan ini, sosialisasi yang sebenarnya menentukan perilaku memilih maupun perilaku politik seseorang, bukan karakter sosiologis. Selain itu, pendekatan ini juga menjelaskan bahwa sikap seseorang sebagai refleksi kepribadian seseorang merupakan variabel yang cukup menentukan dalam mempengaruhi perilaku politik seseorang.

Menurut Adam, (1999:34) model ini, masyarakat dalam menentukan pilihannya dalam suatu proses pemilu lebih banyak dipengaruhi oleh kekuatan psikologis yang berkembang dalam dirinya sendiri. Model psikologis menggunakan identifikasi partai sebagai konsep kunci. Identifikasi partai berarti “rasa keterkaitan individu terhadap partai” sekalipun dia bukan anggota.

Sikap seseorang sangat mempengaruhi perilaku politiknya, yang semuanya itu merupakan akibat dari hasil proses sosialisasi yang panjang. Melalui proses sosialisasi inilah, akan berkembang suatu ikatan yang kuat dengan partai politik atau organisasi masyarakat lainnya. Ikatan seperti inilah yang disebut sebagai identifikasi partai sebagai variabel inti untuk menjelaskan pemilihan berdasarkan Mazhab Michigan.

4. Pendekatan Ekonomi (Rasional)

Menurut Kristiadi (1996:76) mengungkapkan bahwa: teori voting behavior dengan menggunakan pendekatan ekonomi atau rasional menekankan bahwa pemberian suara ditentukan berdasarkan perhitungan rugi rasional berfikir pemilih. Pendekatan rasional berkaitan dengan pola perilaku pemilih masyarakat, yakni orientasi isu dan orientasi kandidat. Orientasi isu berkaitan dengan peristiwa-peristiwa sosial, ekonomi dan politik tertentu yang kontekstual dengan pemilu bersangkutan terutama peristiwa dramatis sementara itu pendekatan rasional terhadap kandidat bisa didasarkan pada kedudukan informasi, prestasi dan popularitas pribadi bersangkutan dalam berbagai bidang kehidupan seperti organisasi, kesenian olahraga dan politik. Pendekatan rasional mengantarkan pada kesimpulan bahwa pemilih benar-benar rasional, para pemilih melakukan penilaian yang valid terhadap tawaran partai.

Berdasarkan tindakan komunikasi , Nimmo dalam Adman Nursal (2004:66) menggolongkan pemilih ini sebagai pemberi suara yang rasional. Pemilih rasional itu memiliki motivasi, prinsip, pengetahuan, dan mendapat informasi yang cukup, tindakan mereka bukanlah faktor kebetulan atau kebiasaan, bukan untuk diri sendiri melainkan untuk kepentingan umum menurut pikiran dan pertimbangan logis.

Berdasarkan penjelasan diatas perilaku pemilih dapat disimpulkan bahwa sebagai respons dan emosional yang diwujudkan dengan cara mencoblos surat

suara. faktor yang saling berkaitan yaitu faktor pilihan rasional, faktor sosiologis, faktor psikologis, faktor rasional yang satu sama lain saling melengkapi. Perilaku pemilih seseorang dapat dipengaruhi oleh sikap seseorang yang terbentuk dari sosialisasi panjang yang terdiri dari gagasan atau program yang bersentuhan pada masyarakat luas, latar belakang keluarga, ruang lingkup pekerjaan, agama atau kegiatan formal dan informal. Sikap seseorang tersebut akan memberikan pemahaman terhadap isu kebijakan dan kandidat.

Berdasarkan dengan 4 pendekatan dalam perilaku pemilih yang telah dijelaskan diatas dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pada perilaku pemilih dengan pendekatan sosiologis (Mazhab Columbia) dan pendekatan psikologis (Mazhab Michigan). Dijelaskan bahwa perilaku pemilih sosiologis dan psikologis menekankan bahwa akan memberikan suara dalam Pilkada melihat dari suatu pekerjaan, pendidikan, umur, etnis, agama, atau wilayah tempat tinggal, dan partai kedekatan secara fisik dengan kandidat serta perasaan suka atau tidak suka terhadap satu parpol atau kelompok elit tertentu yang berkaitan dengan kandidat.

B. Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung

Penyelenggaraan Pilkada dan seluruh elemen yang erat kaitanya terhadap momentum Pilkada seperti KPUD, Panwaslu, Parpol, dan lain sebagainya, tidak hanya memposisikan masyarakat menjadi penonton utama dalam momentum Pilkada. Tetapi masyarakat juga proaktif dalam memberikan

pentingnya *voter education and politic* bagi masyarakat yang menekankan pada ranah kesadaran kritis, kesadaran berpolitik rakyat dan lebih mendasar yakni pentingnya partisipasi. Selain itu pilkada langsung dapat disebut sebagai praktik politik demokratis apabila memenuhi beberapa prinsip, yakni menggunakan azas-azas yang berlaku dalam rekrutmen politik yang terbuka, seperti pemilu legislatif dan pemilihan Presiden dan wakil Presiden, yakni azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

1. Pilkada

Dalam konteks konsolidasi dan penguatan demokrasi, Pilkada langsung menjadi pilar yang memperkuat bangunan demokrasi secara nasional. Terlaksananya Pilkada langsung menunjukkan adanya peningkatan demokrasi karena rakyat secara individu dan kelompok terlibat dalam proses melahirkan pemerintah atau pejabat negara. Pilkada secara langsung merupakan desain kelembagaan untuk mempercepat proses pematangan demokrasi di daerah. Kehidupan demokrasi di tingkat lokal menjadi lahan praktik bagi mewujudkan semangat multikulturalisme yang sangat dibutuhkan bagi terwujudnya harmonisasi dalam etnis pada pemerintahan demokratis.

Pilkada merupakan salah satu media pembelajaran demokrasi bagi masyarakat daerah dan sekaligus untuk terwujudnya hak-hak esensial individu seperti kesamaan hak politik dan kesempatan untuk menempatkan posisi individu dalam pemerintahan daerah. Pilkada telah menuntun pemimpin untuk secara konsisten menjalin hubungan dengan konstituen yang salah satunya

diwujudkan melalui optimalitas anggaran daerah bagi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Ada beberapa keunggulan Pilkada dengan model demokratis secara langsung. Menurut Firmanzah (2008:160), dalam bukunya *Marketing Politik Antara Pemahaman dan Realitas*, sebagaimana diterapkan di Indonesia sejak 2004 melalui Pilpres I dan Pilkada 2005. *Pertama*, melibatkan partisipasi masyarakat konstituen secara luas, sehingga dapat akses dan kontrol masyarakat yang lebih kuat terhadap arena dan aktor yang terlibat dalam proses Pilkada.

Kedua, terjadinya kontrak sosial antara kandidat, partai politik dan konstituen untuk mewujudkan akuntabilitas pemerintahan lokal. *Ketiga*, member ruang dan pilihan terbuka bagi masyarakat untuk menentukan calon pemimpin yang hebat (memiliki kapasitas, integritas dan komitmen yang kuat) dan legitimate di mata masyarakat. Mengingat besarnya manfaat Pilkada langsung bagi pengembangan demokrasi, partisipasi publik dan percepatan mencapai kesejahteraan bagi masyarakat di tingkat lokal.

2. Landasan Hukum Pilkada

Indonesia pertama kali melaksanakan Pemilu pada akhir tahun 1995 yang diikuti oleh banyak partai maupun perseorangan. Pada tahun 2004 telah dilaksanakan Pemilu yang secara langsung untuk memilih wakil-wakil rakyat serta presiden dan wakilnya. Pilkada merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat, awal bulan juni 2005 telah diberlakukannya Pemilihan Kepala Daerah atau sering disebut Pilkada langsung. Ada lima pertimbangan

penting penyelenggaraan Pilkada langsung bagi perkembangan demokrasi di Indonesia:

1. Pilkada langsung merupakan jawaban atas tuntutan aspirasi rakyat karena pemilihan Presiden dan wakil Presiden, DPR, DPD, bahkan kepala desa selama ini telah dilakukan secara langsung.
2. Pilkada langsung merupakan perwujudan konstitusi dan UUD 1945. Seperti telah diamanatkan Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945, Gubernur, Bupati, dan Walikota, masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Hal ini telah diatur dalam UUD No. 32 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
3. Pilkada langsung sebagai sarana pembelajaran demokratisasi (Politik) bagi rakyat (*civic education*). Ia menjadi media pembelajaran praktik berdemokrasi bagi rakyat yang diharapkan dapat membentuk kesadaran kolektif segenap unsure bangsa tentang pentingnya memilih pemimpin yang benar sesuai nuraninya.
4. Pilkada langsung sebagai sarana untuk memperkuat otonomi daerah. Keberhasilan otonomi daerah salah satunya juga ditentukan oleh pemimpin lokal. Semakin baik pemimpin lokal yang dihasilkan dalam pilkada langsung 2005, maka komitmen pemimpin lokal dalam mewujudkan tujuan otonomi daerah, antara lain untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat dengan selalu memerhatikan kepentingan dan aspirasi masyarakat agar dapat diwujudkan.

5. Pilkada langsung merupakan sarana penting bagi proses kaderisasi kepemimpinan nasional. Dari jumlah penduduk Indonesia yang lebih dari 200 juta, jumlah pemimpin nasional yang kita miliki hanya beberapa. Mereka sebagian besar para pemimpin partai politik besar yang memenangi Pemilu 2004. Karena itu, harapan akan lahirnya pemimpin nasional justru dari Pilkada langsung ini.

C . Pemilihan Umum

1. Definisi Pemilihan Umum

Pemilihan umum merupakan pilar utama sistem demokrasi berjalan, kehendak dari rakyat untuk memilih pemimpin. Melalui pemilu rakyat memilih wakilnya, selanjutnya para wakil rakyat ini disertai mandat kedaulatan rakyat untuk mengurus negara. Menurut Efriza (2012: 355) pemilu merupakan cara yang terkuat bagi rakyat untuk berpartisipasi didalam sistem demokrasi perwakilan modern.

Sebuah sistem demokrasi lebih mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi, artinya kepentingan bersama sebuah negara dan bermasyarakat lebih diutamakan untuk dilakukan. Demokrasi merupakan kedaulatan rakyat untuk kepentingan bersama dan kebaikan bersama dalam sebuah negara. Bentuk partisipasi masyarakat dalam sebuah negara demokrasi adalah dengan mengikuti pemilu, hal tersebut

secara langsung atau tidak langsung menyalurkan pendapat dari masyarakat dalam pembuatan kebijakan.

Pemilihan umum merupakan suatu sarana yang dilakukan negara demokrasi, sebagai bentuk manifestasi kedaulatan rakyat. Tujuan dilaksanakan pemilu adalah untuk memilih wakil rakyat dan wakil daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu dilaksanakan oleh negara Indonesia dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat sekaligus penerapan prinsip-prinsip atau nilai-nilai demokrasi, meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

Penyelenggaraan pemilu yang dilakukan bersifat LUBER (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil hanya dapat terwujud apabila penyelenggara pemilu mempunyai integritas yang tinggi serta memahami dan menghormati hak-hak sipil dan politik dari warga negara. Penyelenggaraan pemilu yang lemah berpotensi menghambat terwujudnya pemilu yang berkualitas. Pengertian tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Pelaksanaan pemilu yang berkualitas di Negara Indonesia harus dilakukan oleh semua pihak yang terkait, bukan hanya dari pihak penyelenggara pemilu akan tetapi dari pihak partai politik, kandidat bahkan masyarakat

sebagai pemilih atau partisipasi dari masyarakat juga sangat berpengaruh dalam pelaksanaan pemilu yang berkualitas.

Menurut Abdullah (2009: 3-4) Pemilu berkualitas juga pada dasarnya dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi proses dan hasilnya. Dari sisi proses, pemilu dikatakan berkualitas jika berlangsung secara demokratis, aman, tertib dan lancar serta jujur dan adil. Jika dilihat dari sisi hasil, pemilu yang berkualitas harus dapat menghasilkan wakil-wakil rakyat dan pemimpin negara yang mampu mensejahterakan rakyat, disamping itu dapat mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia dimata dunia internasional, atau dengan kata lain didapatnya pemimpin yang mampu mewujudkan cita-cita nasional, sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbunyi: “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Pemilihan umum saat ini menjadi suatu parameter dalam mengukur demokratis tidaknya suatu negara, bahkan pengertian demokrasi sendiri secara sederhana tidak lain adalah suatu sistem politik dimana para pembuat keputusan kolektif tertinggi di dalam sistem itu dipilih melalui pemilihan umum yang adil, jujur dan berkala. Pemilu memfasilitasi sirkulasi elit, baik antara elit yang satu dengan yang lainnya, maupun

pergantian dari kelas elit yang lebih rendah yang kemudian naik ke kelas elit yang lebih tinggi.

D. Kerangka Pikir

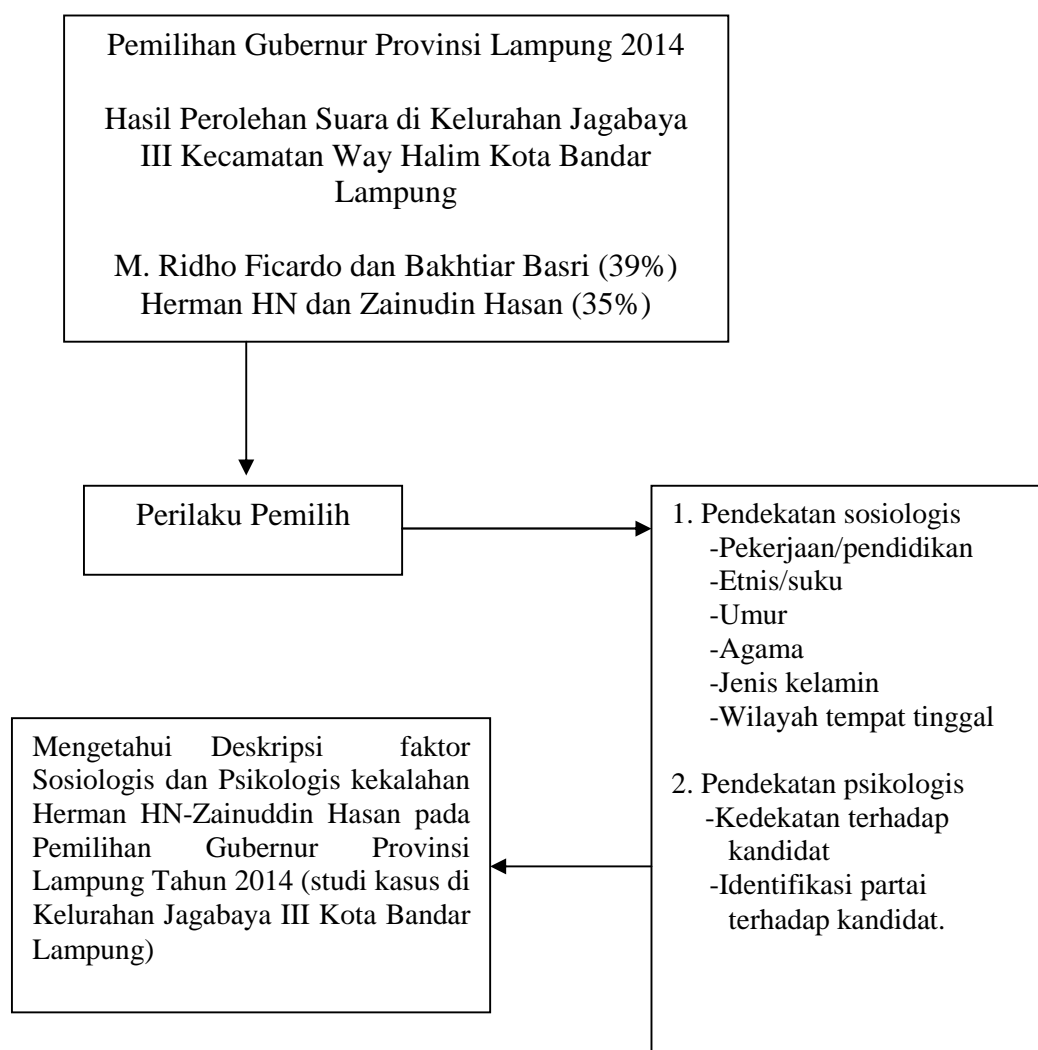
Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada tahun 2014 yang dilaksanakan pemilihan secara langsung di Provinsi Lampung untuk Daerah Kota Bandar Lampung. Pilkada ini diselenggarakan untuk memilih Gubernur dan wakil Gubernur. Pemilihan umum ini dilaksanakan secara langsung, dan transparan dengan ini rakyat memilih pemimpin yang disukai sesuai dengan hati nuraninya tanpa ada paksaan dari siapapun. Pemilihan umum merupakan pilar utama sistem demokrasi berjalan, kehendak dari rakyat untuk memilih pemimpin. Melalui pemilu rakyat memilih wakilnya, selanjutnya para wakil rakyat ini disertai mandat kedaulatan rakyat untuk mengurus negara.

Dalam suatu Pilkada langsung masyarakat dihadapkan kepada pilihan-pilihan calon pemimpin yang mempunyai berbagai cara dalam tindakan politiknya untuk memenangkan pemilihan tersebut. Ini merupakan suatu strategi masing-masing calon agar rakyat memberikan suara kepadanya. Upaya-upaya untuk memenangkan kompetensi tersebut menjadi hal yang sangat signifikan dalam penentuan kemenangan bagi kandidat yang bertarung dalam arena politik tersebut.

Penelitian ini penulis memfokuskan perilaku pemilih dalam dua pendekatan yaitu pendekatan sosiologis dan pendekatan psikologis. Perilaku pemilih memberikan suara dengan pendekatan ini menyebabkan kekalahan pada

pasangan Herman HN dan Zainudin Hasan. Sedangkan, Herman HN sendiri mempunyai latar belakang sedang menjabat sebagai Wali Kota di Bandar Lampung, beliau menuai kekalahan di daerah pemilihannya sendiri. Dari pemikiran yang telah dijelaskan maka, peneliti menggambarkan kerangka pikir sebagai berikut:

Gambar 1. Kerangka Pikir



Keterangan:

- ↓ : Teori yang digunakan
 → : Dilihat dari pendekatan
 ← : Mengetahui Hasil